
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMEDANG NO.180 TAHUN 2022 TENTANG
APLIKASI SINDANG DI DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Sulastri Mardiani
Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Jun 11, 2025

Revised Nov 10, 2025

Accepted Des 03, 2025

Keywords:

E-Governmenet

Publik Policy

Policy Implementation

Application-Based Trading

Information System

ABSTRACT

This research aims to understand the implementation of Sumedang Regent Regulation No. 180 of 2022 regarding the Application-Based Trade Information System (SINDANG) at the Office of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Trade, and Industry of Sumedang Regency. The research method employed is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation to gather information related to policy implementation. The results indicate that the implementation of SINDANG has commenced but is not yet optimal. The communication dimension reveals clear information dissemination through social media, while human resources are still inadequate, particularly in terms of skills. Employee disposition shows support for the application, although there are challenges in technology adaptation. The bureaucratic structure has been established, but its implementation is hindered by limited facilities. Identified hindering factors include a lack of understanding of the policy, varying stakeholder support, and the need for resource enhancement. Efforts made to improve implementation include regular socialization, training, and inter-departmental collaboration. This study recommends greater attention from local government in providing resources and facilities to support the successful implementation of SINDANG.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Sulastri Mardiani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang.

Email: mardiani0403aas@gmail.com

1. INTRODUCTION

Di era digital saat ini, sistem informasi memainkan peran penting dalam mengelola dan memproses data yang berkaitan dengan perdagangan. Sistem informasi yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memperkuat daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Perdagangan, baik di tingkat lokal maupun internasional, menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari manajemen inventaris hingga analisis pasar. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, perusahaan dapat mengelola informasi secara real-time, yang membantu dalam perencanaan dan pengendalian operasional. Misalnya, sistem informasi dapat memberikan data akurat mengenai permintaan pasar, sehingga perusahaan dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan konsumen.

Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan. Selain itu, sistem informasi perdagangan juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya teknologi informasi, proses transaksi dapat terdokumentasi dengan baik, mengurangi risiko kesalahan atau penipuan. Hal ini sangat penting terutama dalam perdagangan, di mana regulasi dan kepatuhan terhadap standar tertentu harus dipenuhi.

Sebelumnya Kabupaten Sumedang dihadapkan dengan permasalahan ekonomi makro khususnya pada pengendalian inflasi. Pemerintah Daerah tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kenaikan pada komoditas, apa saja tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh stakeholder terkait dalam menyikapi kenaikan komoditas tersebut, Sumedang belum memiliki data pembandingan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Sindang merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun pada tahun 2022 dengan berkolaborasi antara Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kab.Sumedang, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dan BPS Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 dan merupakan pembaruan dari aplikasi Bapokting yang sebelumnya dibangun pada tahun 2021 oleh Diskominfosanditik. Pembuatan aplikasi ini tidak mengeluarkan biaya pembuatan atau Gratis, karena dibuat oleh PNS Pranata Komputer Diskominfosanditik dan Diskopukmpp yang mana berkontribusi pada Angka Kredit JF.

Sindang dibangun berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 180 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang. Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang merupakan sebuah inovasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang yang dibuat untuk mengelola dan memonitoring fluktuasi harga barang pokok penting, fluktuasi omset pedagang, fluktuasi kebutuhan dan permintaan masyarakat, Surat Keterangan Menggunakan Kios atau Los (SKMK/L), Pemantauan top komoditas pengendalian inflasi daerah serta Early Warning System Inflasi.

Tabel 1. Peringkat Inflasi Kabupaten Sumedang Tingkat Nasional Tahun 2023

Inflasi Periode ke-1			
	Nilai	Nilai Tertimbang	Peringkat
Kepatuhan Pelaporan	100.00	10	
Jumlah Upaya	20.00	8	
Peringkat Inflasi	63.01	31.5	
Subelanja Inflasi	0.01	3.14	
Total		52.64	
Alokasi (miliar rupiah)			205
Inflasi Periode ke-2			
	Nilai	Nilai Tertimbang	Peringkat
Kepatuhan Pelaporan	70	7	
Jumlah Upaya	53.33	21.33	
Peringkat Inflasi	45.28	22.64	
Subelanja Inflasi	0.16	9.25	
Total		60.23	
Alokasi (miliar rupiah)			208
Inflasi Periode ke-3			
	Nilai	Nilai Tertimbang	Peringkat
Kepatuhan Pelaporan	55.40	5.53968253968254	

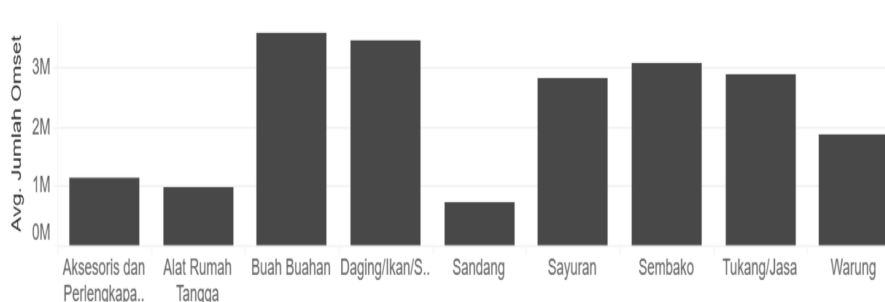
Jumlah Upaya	86.67	34.6666666666667	
Peringkat Inflasi	69.87	34.9333333333333	
Subelanja Inflasi	0.46	19.3539138658951	
Total		94.4935964055777	
Alokasi (miliar rupiah)			62

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data diatas, sindang menjadi tools yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mengendalikan inflasi, hal tersebut dapat dilihat dari ranking Kabupaten Sumedang yang mengalami kenaikan pada tahun 2023, dari sebelumnya peringkat ke 208 menjadi peringkat ke 62 se-Indonesia. Kenaikan peringkat ini menjadi indikator pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumedang sudah meningkat, efektif dan tepat sasaran.

Sindang bertujuan untuk memfasilitasi monitoring dan analisis pasar yang berpengaruh pada inflasi, manajemen data ketersediaan dan kebutuhan barang pokok penting, memberikan peringatan dini terkait potensi inflasi berdasarkan analisis terkini yang disediakan melalui Early Warning System, membantu memastikan keakuratan dan kualitas data melalui verifikasi dan analisis data, meningkatkan pendapatan daerah melalui integrasi sistem pembayaran retribusi pasar secara online dan pencatatan realisasi PAD yang transparan, serta memfasilitasi layanan seperti pembuatan SKMK/L secara online untuk mempermudah akses dan memangkas birokrasi.

Inovasi ini berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang khususnya pada Pendapatan Daerah, Ketahanan Pangan, dan Pembangunan Pedesaan. Inflasi yang terkendali membantu stabilisasi harga barang dan jasa, yang berkontribusi pada kestabilan pendapatan daerah, memastikan harga pangan tetap stabil yang berkontribusi penting untuk ketahanan pangan, selain itu sindang juga berkontribusi pada kestabilan ekonomi di pedesaan, mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.



Gambar 1. Rata-Rata Omset Komoditas

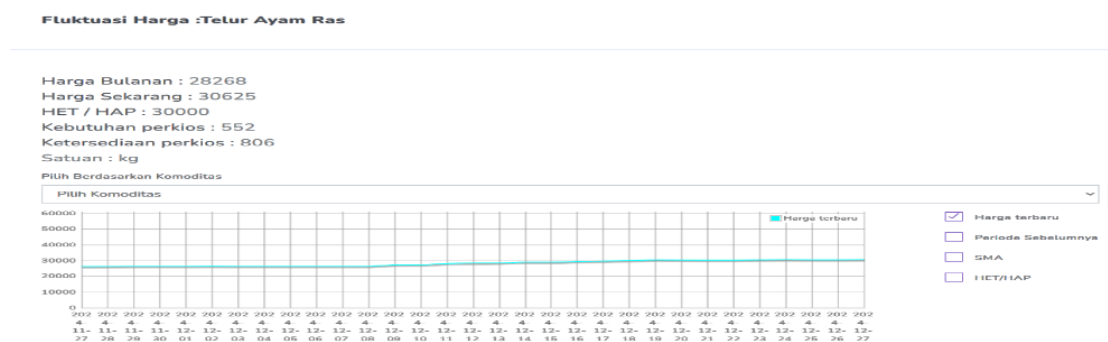
Sumber: sindang.sumedangkab.go.id

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata omset tertinggi pada bulan Desember 2024 dimiliki oleh usaha buah-buahan, kemudian diikuti oleh daging/ikan/seafood, sembako, dan tukang/jasa. Sementara rata-rata omset terendah dimiliki oleh usaha warung, alat rumah tangga dan aksesoris perlengkapan elektronik. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa usaha buah-buahan, daging/ikan/seafood, sembako, dan tukang/jasa memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan keuntungan. Sementara usaha warung, sandang, alat rumah tangga dan aksesoris perlengkapan elektronik membutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan omset dan profitabilitas. Data ini juga menunjukkan bahwa aplikasi Sindang dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu para pelaku usaha dalam menganalisis data dan membuat keputusan bisnis yang tepat.

Sindang adalah inovasi terbaru yang melaksanakan pemantauan secara meluas mulai dari fluktuasi harga, ketersediaan pasokan, alur pemasok, retribusi pasar, omset pedagang sampai ke penyediaan *Early Warning System* potensi inflasi yang menerapkan metode prediksi *Single Moving Average*. Ini menjadi satu satunya aplikasi di Kabupaten Sumedang yang menerapkan *Machine Learning* dengan membaca *Data Time Series* sehingga dapat memprediksi kenaikan harga yang akan terjadi.

4 Mardiani

Implementasi Peraturan Bupati Sumedang No. 180 Tahun 2022 Tentang Aplikasi Sindang di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang



Gambar 1. 1 Fluktuasi Harga

Sumber: sindang.sumedangkab.go.id

Berdasarkan data diatas, pada aplikasi sindang terpantau harga Telur Ayam Ras mengalami kenaikan signifikan pada bulan Desember 2024 di harga Rp.30.625, data tersebut juga mengindikasikan bahwa kebutuhan terhadap Telur Ayam Ras di pasar cukup tinggi dengan total 552 perkios, sedangkan ketersediaan mencapai 806 perkios. Ini menandakan bahwa pasokan Telur Ayam Ras lebih tinggi daripada permintaan.

Sindang menjadi dasar pengambilan kebijakan pimpinan, sehingga tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tepat sasaran dan efektif. Salah satunya pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan berdasarkan hasil prediksi di Sindang dan harga benar-benar mengalami kenaikan sesuai dengan prediksi.

Untuk mencapai tujuan aplikasi Sistem Informasi Perdagangan (SINDANG) di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang perlu adanya kemampuan sumber daya manusia yang baik, melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang baik akan menjamin tercapainya tujuan tersebut. Selain itu Sindang juga memiliki Sumber Daya yang mumpuni untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan inovasi ini.

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang memiliki peran penting dalam pengadaan informasi perdagangan. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada pelaku masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai harga beragam bahan pokok penting (Bapokting) di pasar, serta informasi mengenai ketersediaan atau stok barang di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pranata Komputer Terampil pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang memiliki tugas mengoperasikan dan menyajikan hasil data keperluan analisa data pada Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang dimana menggunakan server internet sebagai akses untuk menggunakan aplikasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, di kantor Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang sudah menerapkan pengolahan informasi perdagangan seperti aplikasi SINDANG ini, karena jaman sekarang semua yang dikerjakan sudah menggunakan digitalisasi.

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Sumedang, terkait dengan implementasi SINDANG ditemukan beberapa indikasi masalah sebagai berikut:

1. Beberapa operator masih merasa kesulitan dalam memahami fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi SINDANG dan kualitas jaringan wifi yang dimiliki Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang terkait pengoperasian aplikasi SINDANG masih kurang. Hal ini dibuktikan adanya operator UPTD pasar yang masih menggunakan cara manual atau konvensional dalam melakukan tugas-tugasnya sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat memanfaatkan aplikasi secara maksimal, sehingga proses kerja menjadi terhambat serta pegawai yang berada di lokasi tersebut tidak dapat mengakses aplikasi SINDANG dengan baik.
2. Kurangnya koordinasi bidang perdagangan pada setiap UPTD pasar. Hal ini mengakibatkan ketidaktepatan dan keterlambatan dalam pelaporan data perdagangan sehingga data yang disampaikan menjadi tidak akurat dan *up to date* yang berdampak pada kualitas informasi perdagangan yang diterima oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang yang dapat mempengaruhi keputusan manajerial terkait pengelolaan pasar serta kebijakan pasar yang diambil oleh pemerintah daerah.
3. Kurangnya kesadaran UPTD Pasar dalam melakukan penginputan dan pelaporan data SINDANG, mengingat untuk melakukan hal tersebut telah ditentukan batas waktu, namun pada kenyataannya banyak pelaporan yang tidak sesuai batas waktu. Hal ini dapat berdampak terhadap informasi mengenai kondisi pasar, sehingga pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan pasar menjadi tidak tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Peraturan

Bupati Sumedang No.180 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Niaga Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Perdagangan (SINDANG) di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.”

2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau yang sering disebut *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2017)

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2017) purposive sampling adalah “Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang dituangkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah (orang)
1	Kasubag Bidang Program	1
2	Kepala Bidang Perdagangan	1
3	Pranata Komputer Terampil Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang	1
4	Operator UPTD Pasar	2
Jumlah		5

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan menurut (Sugiyono, 2017) sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis beragam literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi lapangan, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui teknik berikut:
 - 1) Observasi
 - 2) Wawancara
 - 3) Dokumentasi
 - 4) Triangulasi

Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2017) dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Depenabilitas
4. Uji Konfirmabilitas

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, penelitian melakukan pengelolaan data yang dilakukan dengan mengacu kepada teknik analisis dan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) yaitu sebagai berikut:

- a. *Data Collection*/Pengumpulan Data
- b. Reduksi (*Data Reduction*)
- c. Penyajian Data (*Data Display*)
- d. Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penelitian ini berkenaan dengan hal yang menyangkut sumber daya manusia khususnya dari aspek pembinaan. Oleh karena itu teori-teori utama yang akan dijadikan landasan adalah teori sumber daya manusia dan pembinaan. Menurut (Mathis & Jackson, 2017) mengatakan terdapat beberapa dimensi dalam mengukur pembinaan, yaitu:

- a. Mengatur Strategi
- b. Merencanakan

- c. Mengorganisasi dan Melaksanakan
- d. Mengukur dan Mengevaluasi

3. RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi merupakan kegiatan atau tindakan dari suatu rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi juga dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merujuk pada pelaksanaan kebijakan publik, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti niat legislatif, kapasitas administrasi, dan dukungan eksekutif. Menurut (Agustino, 2016) Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

Keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari hasil yang dicapai telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan penelitian menunjukkan hasil Implementasi Peraturan Bupati Sumedang No.180 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Niaga Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Perdagangan (SINDANG) di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

Tabel 3. Kesimpulan Implementasi Peraturan Bupati Sumedang No.180 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Niaga Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Perdagangan (SINDANG) di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Komunikasi	Transmisi	Penyampaian informasi mengenai implementasi sindang sudah dilakukan melalui media sosial Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang serta bisa di akses melalui sindang.sumedangkab.go.id dan mengadakan sosialisasi pada setiap operator UPTD Pasar dan masyarakat.
		Kejelasan	Komunikasi terkait implementasi aplikasi SINDANG telah dilaksanakan dengan jelas dan rutin dilakukan komunikasi bersama operator untuk menangani pengaduan dan kunjungan ke pasar, serta sosialisasi, bimtek, dan diklat secara berkala serta dukungan grup WhatsApp untuk informasi yang lebih cepat.
		Konsistensi	Pemantauan rutin dan informasi terbaru dilakukan secara konsisten setiap bulan termasuk survei lapangan. Tim pengembangan MSDM juga merencanakan pengembangan secara berkala.
2.	Sumber Daya	Staf Pelaksana	Sekitar 80% pegawai Bidang Perdagangan dan Operator UPTD Pasar dapat menggunakan aplikasi sindang, namun yang lainnya memiliki pemahaman terbatas karena pendidikan.
		Informasi	Informasi sindang memiliki dampak signifikan, terutama dengan penggunaan teknologi seperti robot

			serta terdapat kendala dalam komunikasi harga dengan pelaku pasar, sehingga update harga dilakukan dua kali seminggu (Senin dan Kamis).
		Wewenang	Pengaruh wewenang dalam pengambilan kebijakan pimpinan tampak pada operasi pasar dan intervensi harga, didukung oleh SK formal serta wewenang berada di tangan kepala dinas dan kepala UPTD Pasar, yang memberikan arahan kepada bawahan, sementara perubahan harga dibahas melalui musyawarah dan disesuaikan dengan harga pasar lain.
		Fasilitas	Fasilitas pendukung implementasi terbatas, dengan operator menggunakan perangkat pribadi akibat keterbatasan anggaran. Pelaksanaan dilakukan semaksimal mungkin dengan barang seadanya, dan tidak ada fasilitas dari dinas.
3.	Disposisi	Sikap Pelaksana Kebijakan	Para pelaksana menekankan pentingnya aplikasi SINDANG yang memperbarui informasi setiap hari dan menyebarkannya melalui website serta keterlibatan dengan bidang perdagangan dan UPTD Pasar terlibat langsung, sedangkan pegawai lainnya sebagai pengguna.
		Pengangkatan Staf Sesuai Kemampuan	Staf yang diangkat memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengoperasikan sindang, berkat pelatihan dan sosialisasi pada tahun 2022, serta dukungan pendampingan untuk membantu operator yang lebih tua.
		Insentif	Insentif diberikan setiap bulan untuk implementasi sindang kepada setiap operator, kinerja yang dihasilkan masih di bawah standar terkait beban kerja.
4.	Struktur Birokrasi	Penetapan standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP terkait implementasi sindang sudah dilaksanakan sesuai arahan, pelaksanaannya belum maksimal hal ini disebabkan oleh penyesuaian dengan kondisi lapangan dan keterbatasan sarana prasarana yang ada.
		Fragmantasi	Setiap operator wajib memastikan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan, melaporkan informasi sindang harian, dan menginput harga serta ketersediaan barang.

Sumber: Hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

Berbasarkan hasil kesimpulan di atas mengenai Implementasi Peraturan Bupati Sumedang No.180 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Niaga Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Perdagangan (SINDANG) di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang secara keseluruhan sebagai berikut:

Dimensi komunikasi dalam implementasi sindang dilakukan melalui media sosial dan menunjukkan hasil yang cukup baik dimana sudah dilakukan dengan cara pemanfaatan media sosial dinas yaitu Instagram dan Facebook. Aspek yang terpenuhi adalah indikator transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya komunikasi melalui media sosial, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mulyadi (2018:67), “Komunikasi merupakan suatu proses interaksi dengan suatu stimulus (rangsangan) secara lisan, tertulis maupun aba-aba.” Selain itu dalam kejelasan informasi mengenai implementasi sindang sudah melalui media sosial Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang melalui web sindang.sumedangkab.go.id. Selanjutnya dalam konsistensi mengenai implementasi sindang sudah cukup baik karena telah dilakukan dengan konsisten setiap hari.

Dimensi sumber daya dalam implementasi sindang dilihat dari indikator staf pelaksana implementasi sindang sudah cukup terdapat 11 orang operator. Sekitar 80% pegawai Bidang Perdagangan dan Operator UPTD Pasar dapat menggunakan aplikasi sindang. Untuk indikator informasi implementasi sindang sudah baik dan memiliki dampak yang signifikan terutama penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang bertujuan memantau perilaku konsumen, memprediksi permintaan produk, dan mengoptimalkan stok untuk pengambilan kebijakan terkait perdagangan. Pada indikator wewenang memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan terkait kebijakan pimpinan yang seperti operasi pasar dan intervensi harga. Kemudian fasilitas pendukung implementasi kebijakan sindang ini memiliki kekurangan, dimana tidak ada fasilitas yang diberikan oleh dinas untuk implementasi sindang ini sehingga para pegawai menggunakan fasilitas pribadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Agustino (2017:149) menyatakan bahwa “Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.”

Dimensi disposisi dalam implementasi sindang menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan para pelaksana kebijakan yang cukup baik dengan menekankan pentingnya aplikasi sindang dengan melakukan pembaharuan informasi dan menyebarkannya melalui website dinas serta staf yang diangkat memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup baik untuk mengoperasikan sindang berkat adanya pelatihan dan sosialisasi. Selain itu indikator insentif cukup baik dengan diberikan setiap bulan untuk implementasi sindang kepada operator. Demikian dengan kondisi tersebut menurut Edward III (Agustino, 2017), “Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.”

Kemudian yang terakhir dimensi struktur birokrasi implementasi sistem informasi perdagangan (SINDANG) menunjukkan hasil yang cukup baik. Aspek yang terpenuhi adalah indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Dapat dilihat dari sudah sesuai SOP dengan baik sehingga para pelaksana selalu menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang ditentukan. Begitupula bentuk fragmentasi setiap operator yang selalu memastikan tindakan dan bertanggungjawabkan laporan informasi sindang harian. Sebagaimana menurut Edward III (Indiahono, 2009:32) “Struktur birokrasi merujuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi itu sendiri.”

4. CONCLUSION

Implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks Peraturan Bupati Sumedang No. 180 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Niaga Berbasis Aplikasi SINDANG, memegang peranan penting dalam pengelolaan informasi perdagangan di Kabupaten Sumedang. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengendalian inflasi dan memfasilitasi monitoring harga serta ketersediaan barang pokok. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya.

Implementasi Peraturan Bupati Sumedang No. 180 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Niaga Berbasis Aplikasi SINDANG menunjukkan bahwa meskipun implementasi telah dimulai, hasilnya belum optimal. Dimensi komunikasi telah berjalan baik dengan penyampaian informasi yang jelas melalui media sosial.

Namun, tantangan utama terletak pada sumber daya manusia dan fasilitas yang masih terbatas, serta kurangnya koordinasi di tingkat UPTD pasar. Dukungan pegawai terhadap aplikasi SINDANG cukup positif, tetapi pemahaman dan pelatihan yang lebih mendalam masih diperlukan. Struktur birokrasi yang ada telah

ditetapkan, tetapi pelaksanaannya perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Upaya perbaikan melalui sosialisasi dan pelatihan diharapkan dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem ini.

REFERENCES

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Diansyah, R. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sumedang No.53 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Manajemen Berbasis Aplikasi E-Office di Kantor kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sumedang. *Universitas Sebelas April*.
- Gelinas, U. &. (2012). *Accounting Information System, 9th ed.* South Western : Cengage Learning.
- Marshall, R. (2015). *Accounting Information System (Sistem Informasi Akuntansi)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabilillah, M. (2017). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) (Studi Implementasi Perda No.15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan di Kabupaten Lamongan). *Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tachjan. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Winarno, B. (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center Off Academic Publishing Service).
- Zuthiyah, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Reban Batang. *Universitas Tidar*.